

EDISI RABU, 27 MARET 2024

HARIAN LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

lentera.tv

Lentera TV Media

LAGI-LAGI PUTUSAN BAWASLU TAK BERTAJI

PENGELEMBUNGAN SUARA DI JATIM: KPU SALAH TAPI TAK DISANKSI

Saat sidang perdana gugatan Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi dimulai, Rabu (27/3/2024), keputusan mengejutkan datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) diputus bersalah dalam kasus dugaan pengelembungan suara Golkar di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Ironisnya, majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara. Bawaslu hanya memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bukan kali pertama putusan Bawaslu tak 'bertaji'. Para pemerhati demokrasi pun menyimpulkan, Pemilu 2024 nirintegritas dan penuh malapraktik. Memperkuat ungkapan, "Apapun putusan bersalahnya, teguran hasil akhirnya."

Baca di hal 11....

ENAM TPS DI JATIM TERBUKTI GELEMBUNGAN SUARA

1. TPS 005 Kecamatan Nglegek, Kabupaten Blitar. Perolehan suara calon nomor 9 atas nama Carrel Ticualu. Formulir C.Hasil = 66, tetapi D.Hasil = 67.
2. TPS 005 Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Perolehan suara calon nomor 1 atas nama M Sarmuji. Formulir C.Hasil = 21, namun D.Hasil = 22.
3. TPS 018 Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Perolehan suara calon nomor 4 atas nama Heru Tjahjono. Formulir C.Hasil = 1, tetapi D.Hasil = 2.
4. TPS 009 Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Perolehan suara calon nomor 2 H Kusuma Judi Leksono. Formulir C.Hasil = 0, tetapi D.Hasil = 1.
5. TPS 003, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Perolehan suara calon nomor 2 atas nama H Kusuma Judi Leksono. Formulir C.Hasil = 0, tetapi D.Hasil = 1.
6. TPS 005, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Perolehan suara calon nomor 1 atas nama M Sarmuji. Formulir C.Hasil = 32, tetapi D.Hasil = 33.



Government (Hal.2)
193 Juta Orang
Mudik, Pemerintah
Imbau Warga
Hindari
8-13 Maret

DAFTAR SENGKETA PEMILU

	2004	2009	2014	2019	2024
Jumlah Perkara	44	70	297	262	263*
Kabul	15	24	1	13	
Tolak	13	37	291	82	
Tidak Terima	16	8	2	122	
Tarik Kembali	0	0	2	10	
Gugur	0	0	0	34	
Tidak Berwenang	0	0	0	0	
Dalam proses Tahun ini	-	-	1	1	

* Pemilu 2024 (26 maret 2024)

JADWAL IMSAKIYAH RAMADAN 1445 H/2024 KOTA SURABAYA

TANGGAL	25 Mar 2024	26 Mar 2024	27 Mar 2024	28 Mar 2024	29 Mar 2024	30 Mar 2024	31 Mar 2024
IMSAK	04:08	04:08	04:08	04:07	04:07	04:07	04:07
SUBUH	04:18	04:18	04:18	04:17	04:17	04:17	04:17
TERBIT	05:29	05:29	05:29	05:29	05:29	05:29	05:29
DUHA	05:57	05:57	05:56	05:56	05:56	05:56	05:56
ZUHUR	11:38	11:38	11:38	11:37	11:37	11:37	11:36
ASAR	14:52	14:52	14:52	14:52	14:52	14:52	14:52
MAGHRIB	17:40	17:39	17:39	17:38	17:38	17:37	17:37
ISYAH	18:48	18:48	18:47	18:47	18:47	18:46	18:46

193 Juta Orang Mudik, Pemerintah Imbau Warga Hindari 8-13 Maret



(Ilustrasi) Pemerintah mengimbau masyarakat melaksanakan mudik Lebaran 2024 lebih awal.dok

JAKARTA-Diprediksi 193 juta orang akan mudik. Sementara puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-2 Lebaran, sedangkan puncak arus balik pada H+

Pemerintah mengimbau warga untuk mudik lebih awal agar tidak bermacam-macetan di jalan. Mengenai prediksi puncak mudik itu disampaikan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Jumlah pemudik tahun ini juga diperkirakan mencapai 193 juta orang.

"Pertama, puncak mudik diperkirakan akan terjadi tanggal 5 sampai 8 April 2024," ujar Muhadjir. "Arus balik diperkirakan akan terjadi tanggal 13 sampai 16

April 2024," tambahnya.

Dia mengatakan jumlah pemudik diperkirakan mencapai 193 juta orang. Jumlah itu, katanya, mengalami kenaikan 50 persen dibanding mudik tahun lalu.

"Jumlah pemudik berdasarkan hasil survei diprediksi akan sekitar 193 juta, atau terdapat kenaikan 50 persen dibanding mudik tahun lalu,"

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat melaksanakan mudik Lebaran 2024 lebih awal. Hal itu guna mengantisipasi kepadatan saat arus mudik.

"Berkaitan dengan puncak mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK itu mulai H-4, tapi kalau hari ke 4,

3, 2, 1, itu akan tinggi sekali (jumlah masyarakat yang mudik)," kata dalam kesempatan yang sama.

"Oleh karenanya, kita mengimbau sebagian anak-anak yang sudah libur bisa mudik lebih awal," tambahnya.

Budi juga mengimbau masyarakat tidak mudik menggunakan sepeda motor. Dia berharap masyarakat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan berbagai instansi.

"Kita imbau kiranya tidak mudik menggunakan motor, karena sangat bahaya apalagi, Polri, BUMN, TNI juga banyak yg berikan mudik gratis, gunakan dengan baik," imbaunya.

Ancaman Cuaca Ekstreme

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkap secara umum kondisi cuaca selama pekan mudik Idul Fitri atau Lebaran 2024 dibagi dalam tiga fase periodik. Dia kemudian meminta masyarakat yang akan mudik untuk memperhatikan tiga fase tersebut.

"Pada periode pertama atau sepekan sebelum Idul Fitri (3-9 April 2024), BMKG memprediksi wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dalam kategori ringan-sedang," ujar Dwikorita dilansir siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (26/3/2024).

"Lalu, periode kedua atau sepekan saat Idul Fitri 2024 (10-16 April 2024), BMKG memprediksi kondisi cuaca di Indonesia secara umum cerah-cerah berawan," katanya lagi.

Sedangkan periode ketiga atau sepekan setelah Idul Fitri (17-23 April 2024), BMKG memprediksi Indonesia bagian utara dan tengah berpotensi mengalami hujan dengan kategori ringan-sedang.

Selain tiga fase tersebut, BMKG juga memprakirakan kondisi cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah sepanjang masa mudik Lebaran 2024. Oleh karenanya, Dwikorita mengimbau para pemudik untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran.

"Kami mengimbau kepada seluruh pemudik, penyedia jasa transportasi, dan operator transportasi untuk mewaspadaai kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem selama arus mudik. Dinamika atmosfer di Indonesia sangat dinamis sehingga bisa tiba-tiba berubah," kata Dwikorita. (Wid,rls,ist/dya)

JADWAL GANJIL GENAP JALUR MUDIK 2024

ARUS MUDIK

1. Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 WIB hingga Minggu, 7 April 2024 pukul 24.00 WIB mulai dari km 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan km 414 ruas Tol Semarang-Batang

2. Senin, 8 April 2024 dan Selasa, 9 April 2024, pukul 08.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB mulai dari km 0 Jalan Tol Ruas Dalam Kota Jakarta sampai dengan km 414 ruas Tol Semarang-Batang.

ARUS BALIK

1. Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB mulai dari km 414 ruas Jalan Tol Semarang-Batang sampai dengan km 0 Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

2. Sabtu, 13 April 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB mulai dari km 414 ruas Jalan Tol Semarang-Batang sampai dengan km 0 Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

3. Hari Minggu, 14 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 16 April 2024 pukul 08.00 WIB km 414 ruas Tol Semarang-Batang sampai dengan km 0 Tol Ruas Dalam Kota Jakarta.

JADWAL CONTRAFLOW

ARUS MUDIK

Hari Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan Kamis, 11 April 2024 pukul 24.00 mulai dari KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

ARUS BALIK

Hari Jumat, 12 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

PELANGGAR AKAN DITILANG ETLE

Penerapan aturan ini akan diawasi oleh kamera ETLE (Electronic traffic law enforcement). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa pelanggar tidak akan diputar balik namun langsung ditilang melalui ETLE.

IMBAUAN TIDAK MENGGUNAKAN MOTOR

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau kepada masyarakat yang ingin mudik Lebaran untuk tidak menggunakan sepeda motor. Ia menyatakan, bahwa mudik menggunakan sepeda motor beresiko tinggi terjadi kecelakaan.



Sepakat! DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

JAKARTA- Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah sudah selesai melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) dalam Fase Awal Seribu Hari Kehidupan.

Selanjutnya, Komisi VIII akan segera melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk menentukan jadwal pengambilan keputusan tingkat II dalam forum Rapat Paripurna.

Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka mengatakan, RUU KIA merupakan inisiatif DPR RI yang awalnya diusulkan Badan Legislasi (Baleg).

"RUU ini merupakan komitmen Komisi VIII bersama pemerintah untuk mensejahterakan ibu dan anak khususnya pada fase awal kehidupan," ujarnya dikutip Selasa (26/3/2024).

RUU KIA antara lain mengatur tentang ibu yang cuti sesudah melahirkan tidak bisa diberhentikan dari tempatnya bekerja, dan hak cuti suami untuk mendampingi istri selama proses persalinan.

Terkait itu, Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, ada perubahan nama dari awalnya Kesejahteraan Ibu dan Anak, menjadi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Dalam RUU tersebut, definisi anak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU Perlindungan Anak.

"Yang didefinisikan dalam RUU KIA adalah anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Yaitu, seseorang yang kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun," katanya.

Mengenai cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, paling cepat tiga bulan pertama, dan paling lama tiga bulan berikutnya.

Kalau ada kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, setiap ibu pekerja yang melaksanakan hak atas cuti melahirkan, tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya.

Ibu yang cuti melahirkan juga berhak mendapatkan upah penuh untuk tiga bulan pertama. Lalu, untuk bulan keempat sampai keenam sebanyak 75 persen dari upah.

Tentang cuti buat suami yang mendampingi istri bersalin, Bintang bilang pekerja diberikan cuti dua hari dan paling lama tiga hari berikutnya, atau sesuai kesepakatan.

Sedangkan untuk aparatur sipil negara, anggota TNI-Polri, diatur dalam peraturan perundang-



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga (kanan) menerima berkas RUU KIA di ruang rapat komisi VIII DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024). (Kementerian PPPA)

undangan di bidang ASN, TNI, dan Polri.

Lebih lanjut, Bintang menjelaskan RUU KIA bukan cuma memperhatikan hak ibu yang bekerja, dan ibu penyandang disabilitas. Tapi, juga ibu dengan kerentanan khusus, semisal sedang berhadapan dengan hukum, dan ibu di lembaga pasyarakatan.

Kemudian, ibu di penampungan, ibu dalam situasi bencana, ibu dalam situasi konflik, ibu tunggal, ibu korban kekerasan, ibu dengan HIV AIDS, ibu yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan atau ibu dengan gangguan kejiwaan.

Pengamat Ingatkan Target Prolegnas

Terpisah, Koordinator Divisi Reformasi Parlemen Indonesia Parliamentary Center (IPC) Choris Satun Nikmah mengatakan perlu komitmen kuat DPR dalam menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 pada tahun politik.

Menurutnya, Prolegnas 2024 menjadi perhatian karena pemilihan umum (pemilu) dan (pemilihan kepala daerah) diadakan pada 2024, sehingga tantangan yang dihadapi selama ini dalam proses penyusunan undang-undangan bertambah.

"DPR dalam pemilu juga memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemilu. Tantangan tersebut juga menyebabkan spotlight akan terbagi ke pemilu," kata Choris dalam diskusi daring TII Policy Talks bertajuk Serba-Serbi Prolegnas 2024 di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Selain itu, lanjut dia, waktu DPR pada tahun ini juga terbagi antara fungsi legislasi dan pengawasan,

terutama untuk melakukan evaluasi bersama dengan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, ia memperkirakan kinerja legislasi tahun ini kemungkinan semakin menurun.

Choris berpendapat pemilu tentu berpengaruh ke kinerja legislasi, terutama setelah diselenggarakan pilkada pada akhir tahun ini. Untuk itu, dirinya menilai perlu dipastikan kembali komitmen anggota DPR dalam menyelesaikan Prolegnas 2024.

"Jika tidak selesai, harapannya adalah agar DPR yang kembali terpilih akan meneruskan di masa prolegnas selanjutnya dengan tetap mempertimbangkan masukan yang sebelumnya sudah masuk," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Christina Clarissa Intania mengingatkan bahwa dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2024, terdapat 19 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah ada sejak Prolegnas 2015-2019.

Sebanyak 19 RUU itu di antaranya meliputi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Christina menyebutkan demo untuk mendesak pengesahan RUU PPRT sudah berlangsung di depan kantor DPR selama lebih dari 180 hari dan ada tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara karena belum disahkannya RUU MHA yang berlarut-larut.

"Perlu dipertanyakan apa tantangan dalam proses pengesahan berbagai RUU ini hingga berlarut-larut belum disahkan juga," ungkap Christina.(wid,rls,ant/dya)

POIN-POIN PENTING DALAM DRAF RUU KIA:

- Cuti melahirkan**
 Dalam draf RUU KIA diatur soal cuti melahirkan yang diusulkan paling sedikit 6 bulan. Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. UU ini mengatur bahwa durasi waktu cuti melahirkan 3 bulan.
- Gaji penuh 3 bulan**
 Selama masa cuti, ibu melahirkan diusulkan tetap mendapat gaji penuh pada 3 bulan pertama. Kemudian, 3 bulan setelahnya, gaji yang diterima ibu melahirkan diusulkan sebesar 75 persen.
- Hak saat keguguran**
 Selain ibu melahirkan, RUU KIA juga memberikan hak bagi ibu yang mengalami keguguran untuk beristirahat selama 1,5 bulan.
- Tidak boleh diberhentikan**
 RUU KIA mengatur bahwa ibu yang melahirkan ataupun keguguran dan menjalani masa cutinya tidak bisa diberhentikan. Sebab, cuti menjadi hak bagi setiap ibu melahirkan maupun keguguran. Jika ibu melahirkan diberhentikan dari pekerjaannya atau tidak memperoleh haknya sebagaimana yang diatur dalam UU KIA, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak ibu terpenuhi.
- Hak fasilitas ibu dan anak**
 RUU KIA juga mengatur hak bagi ibu dan anak meliputi dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana di tempat kerja, tempat umum, dan alat transportasi umum. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana dapat berupa penyediaan ruang laktasi, ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, tempat bermain anak, dan/atau tempat duduk prioritas atau loket khusus. Selain itu, dukungan dalam bentuk penyesuaian tugas, jam kerja, dan/atau tempat kerja dengan tetap memperhatikan kondisi dan target capaian kerja.
- Cuti untuk suami**
 Selain ibu melahirkan, RUU KIA juga mengatur hak cuti suami untuk mendampingi istri yang melahirkan atau keguguran. Dalam draf RUU KIA disebutkan, suami mendapatkan cuti paling lama 40 hari untuk mendampingi istri melahirkan dan paling lama 7 hari jika istri keguguran.

*Hak-hak anak RUU KIA juga mengatur hak-hak anak, salah satunya hak anak mendapat-kan air susu ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan. Selain itu, diatur juga hak anak lainnya, di antaranya:

- hak untuk hidup
- tumbuh
- berkembang secara optimal
- hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi kejahatan penganiayaan eksploitasi penyimpangan seksual dan penelantaran
- hak memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang sesuai untuk tumbuh kembang.

Soal Bansos Dihentikan Jelang Pilkada Menko PMK Sebut KPK Tidak Bijak

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan penyaluran bantuan sosial jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak bijak.

Muhadjir menegaskan, tidak ada alasan untuk menghentikan penyaluran bansos karena bansos penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terlepas dari ada pilkada atau tidak. "Misalnya targetnya untuk menangani masalah kemiskinan, menekan kelaparan, masa lapar boleh ditunda karena sambil menunggu pilkada? Ini saya kira usulan yang menurut saya ya, kurang bijak," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Muhadjir mengingatkan bahwa program penyaluran bansos tidak dilindungi oleh regulasi, misalnya bantuan program keluarga harapan (PKH) harus disalurkan setiap tiga bulan sekali.

Ia menyebutkan, pemerintah sudah mendesain program penyaluran bansos agar tidak mudah disalahgunakan, misalnya menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar tepat sasaran.

"Kalau by name by adress gimana cara menyalahgunakannya? Saya kok tidak yakin ya itu bisa dilakukan," ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Muhadjir pun mendorong lembaga penegak hukum untuk mengawasi proses penyaluran bansos ketimbang meminta pemerintah untuk menghentikannya.

"Kalau pilkada, menurut saya pengawasannya yang harus diperketat. Misalnya oleh KPK, oleh BPK, oleh inspektorat itu diawasi betul sehingga jangan sampai kemudian ada yang disalahgunakan," ujar Muhadjir.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap pemerintah daerah tidak



Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy

menggelontorkan bansos jelang Pilkada 2024 demi menghindari praktik politik uang. "Saya sih berharap ada perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada," kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

"Coba upayakan bapak ibu sekalian, Pak Sekjen, Pak Inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum Pilkada," lanjut Alex.

Eks hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu menyebutkan, momen penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kemarin pun menunjukkan masyarakat dibanjiri bansos menjelang hari pencoblosan. Hal ini sudah sesuai dengan dugaan KPK bahwa masyarakat akan memilih calon anggota DPR, kepala daerah, atau kepala negara yang memberikan politik uang.

"Preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertamanya apa bapak ibu sekalian? Faktor uang. Itu dari survei kami di KPK," ujar Alex.

Tak Efektif Entaskan Kemiskinan

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menegaskan, bansos memang tidak tepat dijadikan senjata utama untuk memberantas kemiskinan. Ia mengatakan bukan berarti bantuan sosial tidak diperlukan, tetapi ini tidak seharusnya dijadikan prioritas utama.

"Karena untuk bisa mengeluarkan seseorang dari kemiskinan itu mestinya dia diberdayakan supaya dia betul-betul dari orang miskin menjadi orang tidak miskin lagi," kata Faisal.

"Caranya tentu saja dengan tidak kasih dia uang, tidak dengan ikan, tapi umpan. Jadi, dia dibuat berdaya ekonominya, pekerjaannya, supaya dia bisa dapat pekerjaan yang lebih layak secara income (pendapatan). Jadi, melalui pemberdayaan (bukan dengan bansos)," tegasnya.

Faisal meyakini kehadiran bansos seharusnya cuma sebagai pelengkap. Bantuan semacam ini bisa disalurkan negara jika memang keadaannya benar-benar darurat.

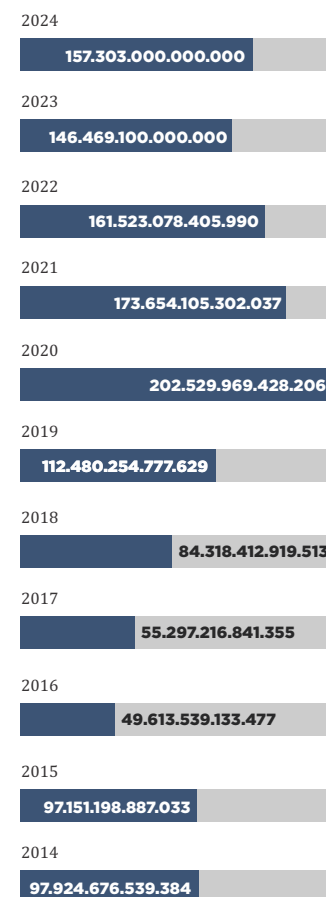
Ia menyinggung beberapa pengecualian pemberian bansos. Misal, untuk mereka para lanjut usia (lansia) yang sudah tidak mampu lagi bekerja.

"Tapi, masalahnya bansos kan tetap terus diberikan dengan angka yang cukup besar setiap tahunnya. Padahal, kita tahu dalam implementasinya sendiri banyak ketidaktepatan sasaran. Banyak orang yang semestinya tidak dapat, mereka dapat. Terus orang yang betul-betul miskin banyak tidak dapat," kritik Faisal.

Di lain sisi, Faisal mengatakan ada perbedaan mendasar antara subsidi dan bansos. Jika bantuan sosial umumnya digunakan untuk keperluan konsumtif, ia menyebut subsidi sering dipakai untuk kegiatan produktif.

Hanya saja, ia menyoroti masih adanya ketidaktepatan sasaran dari penyaluran subsidi, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Oleh karena itu, Faisal mendesak perlunya pembenahan target penerima subsidi tersebut. (wid,rls,ist/dya)

ANGGARAN BANSOS DALAM APBN INDONESIA (2014-2024)*



12.800.000.000.000

REALISASI BELANJA BANSOS BERDASARKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (1 JANUARI-29 FEBRUARI 2024)

7.700.000.000.000

1.100.000.000.000

900.000.000.000

800.000.000.000

Tahap II Pembayaran Biaya Haji Ditutup Sebanyak 194.744 Jamaah Reguler Lunas



(ilustrasi) Total sudah ada 194.744 jamaah reguler yang telah melakukan pelunasan.dok

JAKARTA- Pelunasan Tahap II Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jamaah reguler 1445 H/2024 M ditutup Selasa (26/3/2024). Total sudah ada 194.744 jamaah reguler yang telah melakukan pelunasan.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan, hari ini, pelunasan tahap

II biaya haji jamaah reguler ditutup. Total ada 194.744 jamaah reguler yang melunasi.

"Jumlah yang melunasi terdiri atas 192.874 jamaah reguler, 1.484 Petugas Haji Daerah (PHD), dan 386 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)," terang Saiful dalam keterangan tertulisnya, Selasa

(26/3/2024).

Kuota jamaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 221.000. Selain itu, Indonesia mendapat 20.000 kuota tambahan. Totalnya, 241.000 kuota, terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.

"Artinya, masih ada sisa kuota," sebut Saiful.

Saiful menambahkan, pihaknya masih menimbang rencana pembukaan perpanjangan pelunasan. Saat ini masih disiapkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait kriteria jamaah berhak lunas tahap perpanjangan.

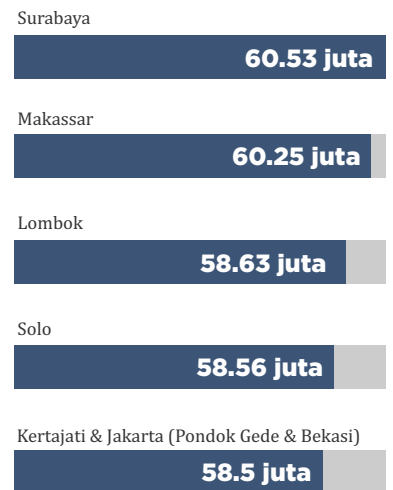
"Saat ini tercatat juga sudah ada 26.351 jamaah yang sudah melunasi tapi dengan status cadangan. Mereka akan mengisi

kuota jika sampai batas akhir tahapan pelunasan masih ada yang tersisa," jelas Saiful.

Diketahui, kuota penyelenggaraan haji di Indonesia tahun 2024 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Kuota haji tahun ini mencapai 241.000 jamaah.

Awalnya Indonesia mendapat jatah kuota haji sebesar 221.000 jamaah haji, namun ada tambahan kuota sebesar 20.000. (wid,rls,ist/dya)

5 KOTA DENGAN BIAYA HAJI TERMAHAL BERDASARKAN EMBARKASI (10 JANUARI 2024)



Sumber: Katadata

Penipuan Haji Furoda, Polda Metro Jaya: Korban Rugi Rp 563 Juta

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan pemberangkatan Haji Furoda atau haji undangan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Terlapor adalah tersangka berinisial SJA sebagai Direktur PT. Musafir Internasional Indonesia dengan jenis perseroan swasta nasional, bergerak sebagai pelaku usaha 'tour travel' ibadah umroh sejak 2019," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Ade Ary menjelaskan kasus ini berawal dari laporan korban suaminya berinisial TBS dan GS yang telah teregistrasi Nomor: LP/B/5826/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 29 September 2023.

"Korban mendaftarkan haji di PT Musafir Internasional Indonesia dengan mengambil paket Haji Furoda VIP. Kemudian korban dijanjikan oleh tersangka akan diberangkatkan

secepatnya, namun baru berangkat pada Juni 2023," katanya.

Kemudian, lanjutnya, ternyata korban setelah sampai di Arab Saudi, tidak menikmati fasilitas Haji Furoda, tetapi Haji Backpacker sehingga mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penginapan dan lainnya.

Ade Ary menambahkan atas kejadian tersebut, berdasarkan kronologis laporannya, korban merasa dirugikan Rp563 juta oleh perusahaan yang telah berdiri tahun 2019 dengan berkantor di Sinarmas Land Plaza Lt. 12, Jl. Pemuda No 60-70, Kel. Embong Kalisan, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur itu.

"Berdasarkan pendalaman dari penyidik, perusahaan milik tersangka, ijinnya adalah hanya umroh, tapi menerima atau mengajak masyarakat untuk berangkat Haji Furoda," katanya.

Setelah penyidik melakukan penelusuran, akhirnya berhasil ditangkap pada 14 Maret 2024.

"Tersangka saudara SJA ini



Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi

ditangkap kemudian dibawa dari kota Mataram, Lombok kemudian dibawa ke Jakarta hingga akhirnya ditahan," ucapnya.

Tersangka dikenakan beberapa pasal di UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP dan UU

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Dengan maksimal penjara selama 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar," kata Ade Ary. (wid,rls,ist/dya)

Gaduh Jabatan Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang Dirut: Diperpanjang atau Tidak, Siap Terima

MALANG - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai kemungkinan terkait masa jabatan yang akan segera berakhir. Diketahui ada dua kemungkinan, yaitu memperpanjang masa jabatan atau mengganti jajaran Direksi

"Kalau memang keputusannya diperpanjang, saya siap-siap saja. Kalau amanatnya seperti itu, ya siap saja. Karena saya itu dari dulu mau jadi DPR, mau jadi pengusaha, dirut, saya selalu siap. Kita semua itu harus melatih diri untuk selalu siap. Karena hidup ini penuh dengan probabilitas. Kita akan menjumpai sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya," ujar Muhlas, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (26/3/2024).

Selama lima tahun kepemimpinan, Muhlas mengungkapkan ada berbagai tantangan yang dihadapi. Menurutnya, setiap pekerjaan dan profesi memiliki dinamika dan tantangan tersendiri.

Dalam kesempatannya ini, Muhlas juga menekankan pentingnya persiapan baik secara mental maupun emosional, dalam menghadapi berbagai dinamika dalam pekerjaan. "Tentu semua pekerjaan, profesi ada tantangannya sendiri-sendiri, ada dinamikanya, ada romantikanya, ada sedih senangnya. Mau jadi apa saja, ada dinamikanya. Jadi harus dipersiapkan baik mentalnya ataupun perasaannya," tegasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, proses penilaian dan evaluasi masa jabatan Direksi Tugu Tirta, hingga saat ini masih berlangsung. Menurutnya, keputusan akhir hanya menyisakan dua opsi, yakni perpanjangan masa jabatan atau pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk pergantian Direksi.

Meskipun telah menerima laporan dari Dewan Pengawas (Dewas) dan pembina BUMD, Wahyu menegaskan, keputusan akhir ada di tangannya, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).



Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas. (Santi/Lenteratoday)

"Nanti sore dilaporkan dan insyaallah tanggal 27 besok ini keputusannya. Masih ada waktu," tegas Wahyu.

Diketahui, rencana penentuan nasib masa jabatan Direksi Tugu Tirta, sejatinya telah direncanakan pada

Jumat (22/3/2024) kemarin. Namun, terkait alasan mundurnya jadwal tersebut, Wahyu mengaku perlu melakukan konsultasi kepada Mendagri, untuk dapat menentukan keputusan yang cermat. (Santi/Dya)

Disperpusip Kota Batu Ajukan Alokasi Tenaga Arsiparis dalam Formasi CASN 2024

BATU - Keterbatasan tenaga arsiparis menjadi salah satu tantangan serius dalam pengelolaan arsip di Kota Batu. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Diperpusip) Kota Batu, Santi Restuningsasi, saat ini jumlah arsiparis yang tersedia masih jauh dari cukup. Di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Batu, misalnya, hanya ada 4 tenaga arsiparis yang bertugas.

Terlebih, Santi menyebut kondisi ini tidak hanya terjadi di LKD, melainkan juga di hampir seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kota Batu. Untuk itu, Santi mengaku telah mengajukan alokasi tenaga arsiparis dalam kuota Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 nanti.

"Jadi keterbatasan tenaga arsiparis di hampir seluruh OPD, ini juga membuat kami agak kerja keras. Artinya kami turut membantu SKPD lain untuk menertibkan arsip-arsipnya," ujar Santi, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Selasa (26/3/2024).

Santi menambahkan, idealnya setiap SKPD memiliki minimal satu atau dua arsiparis. Namun kenyataannya, mayoritas SKPD di Kota Batu belum memiliki arsiparis dalam membantu melakukan pengelolaan kearsipan.

Menurutnya, tugas arsiparis sangat vital dalam menjaga integritas dan keteraturan arsip, sehingga



Pemeriksaan ternak sapi oleh tim DPKH Kabupaten Malang. (Dok. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Malang)

keberadaan mereka menjadi sangat penting dalam suatu organisasi, terutama pemerintahan.

"Karena kan arsiparis merupakan tenaga yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan arsip. Mereka bertanggung jawab dalam mengorganisir, menyimpan, dan menjaga keamanan arsip-arsip sebuah instansi

atau lembaga," tambahnya.

Demi mengatasi masalah keterbatasan tenaga arsiparis, Santi menyebutkan, Disperpusip Kota Batu telah mengajukan alokasi tenaga dalam formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Santi menyatakan, hal ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan arsiparis

di Kota Batu.

Santi juga mengaku telah menginformasikan kebutuhan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu, serta berharap agar formasi tenaga arsiparis dapat segera dibuka.

"Syukur-syukur kalau pelamarnya merupakan arsiparis tenaga ahli utama. Karena itu yang memang kami butuhkan saat ini. Jadi kalau ada dari eselon II yang ingin menjadi tenaga arsiparis, kami sangat membutuhkan itu. Ya semoga saja formasinya di CASN nanti ada," terangnya.

Lebih lanjut, pentingnya keberadaan arsiparis juga semakin terlihat seiring dengan meningkatnya kesadaran SKPD tentang pengelolaan arsip. Santi menekankan, meskipun belum memiliki arsiparis sendiri, SKPD di Kota Batu mulai menyadari pentingnya menjaga dan mengelola arsip-arsip dengan baik.

Dalam konteks ini, Santi telah berencana untuk melakukan digitalisasi terhadap arsip yang masuk ke Depo Arsip. Dengan digitalisasi ini, diharapkan penataan arsip di Depo Arsip dapat lebih terkelola dengan baik. "Jadi misal sewaktu waktu ada OPD yang ingin meminjam dokumen, itu kita tinggal menyetikkan saja nama dokumennya apa, tanggal berapa. Tinggal klik-klik," tukasnya. (Santi/Dya)

PSIKOLOGI UIN MALANG, FUJI ASTUTIK, M.Psi. BICARA SOAL CUTI AYAH

PSIKOLOG sekaligus dosen di Fakultas Psikologi UIN Malang, Fuji Astutik, M.Psi., mengungkapkan pentingnya pemberian 'Cuti Ayah' saat istri melahirkan.

Konon, pemberian cuti ayah ini akan menghasilkan keterlibatan aktif seorang ayah yang membawa dampak langsung pada tumbuh kembang anak.

Menurut Fuji, peran ayah dalam proses kelahiran sangatlah penting. Dirinya menggarisbawahi bahwa pengasuhan anak membutuhkan keterlibatan aktif baik dari ayah maupun ibu, terutama dalam proses melahirkan.

"Kalau dari sisi ibu, orang habis melahirkan butuh banyak dukungan baik secara moral, materil, fisik, dan psikologis juga. Kalau secara psikologis, Ibu butuh orang yang bisa memahami dia. Kalau ada ayah di sisinya, berarti kan ada yang bantu secara langsung dan itu akan meringankan bebannya si Ibu," ujar Fuji, kepada Lenteratoday.

Fuji menegaskan, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak memiliki dampak positif yang signifikan, terutama pada tumbuh kembang anak.

Menurutnya, kehadiran pera ayah akan membantu membangun karakter anak, membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk pengambilan keputusan dengan logika, dan memberikan contoh yang penting dalam membentuk identitas gender bagi anak laki-laki maupun perempuan.

"Kalau ketiadaan sosok ayah, salah satunya berdampak pada karakter anak. Karena yang bisa membangun karakter anak itu ayah. Kalau pada perempuan, banyak yang bilang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Bayangkan kalau figur itu tidak ada, pasti akan ada sesuatu yang kosong," tambahnya.

Lebih lanjut, Fuji menekankan bahwa pengasuhan anak yang optimal memerlukan keterlibatan aktif baik dari ayah maupun ibu.

Dukungan ayah selama istri melahirkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi ibu, tetapi juga berdampak positif pada tumbuh kembang anak.

"Jadi, dalam pengasuhan anak itu harus ada dua-duanya, ayah dan ibu. Ini bukan tentang tidak ada orangnya, tapi tidak ada perannya, pasti ada yang kosong dalam kehidupan anak," tukasnya.

Sebagai informasi, dikutip dari laman web menpan.go.id, pemerintah

pusat kini tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari UU No. 20/2023 tentang ASN.

Salah satu poin yang akan diatur di dalamnya, yakni hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal pada April 2024 mendatang.

Fuji Astutik, seorang ibu satu anak, lahir di Sumenep pada tanggal 7 April 1990. Fuji merupakan seorang pakar dalam bidang psikologi klinis dan psikolog keluarga.

Pendidikan S1 nya ditempuh di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sementara gelar S2 nya diraih dari Universitas Airlangga.

Dengan latar belakang pendidikan tersebut, tak hanya menjadi seorang dosen di UIN Malang, namun Fuji juga turut membantu individu dan keluarga mengatasi berbagai tantangan psikologis.

"Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari. Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN," ungkap MenPan-RB RI, Abdullah Azwar Anas.

"Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran. Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas, dilansir dari laman KemenpanRB.

Menurut Azwar Anas, suami berperan penting dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-

persalinan.

Sebelumnya, cuti suami ketika istrinya melahirkan tidak diatur secara khusus. Aturan sebelumnya hanya mengatur cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Namun, sejumlah negara dan perusahaan multinasional sudah memberikan fasilitas tersebut, seperti Spanyol, Korea Selatan, Jepang, dan Islandia.

Lantas, berapa lama cuti ayah atau suami saat istri melahirkan diberikan?

Usulan waktu cuti ayah saat istri melahirkan

Cuti ayah akan diberikan bagi para ASN pria ketika istrinya melahirkan atau keguguran. Lama cuti ayah ini masih digodok oleh pemerintah.

Namun, waktu cuti ayah tersebut diusulkan berkisar

15 hari, 30 hari, 40 hari, dan 60 hari.

"Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN," ungkap Anas.

Usulan cuti ayah ini merupakan bentuk aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, mulai dari stakeholder, termasuk DPR.

Usulan tersebut kemudian masuk ke dalam salah satu poin RPP tentang Manajemen ASN sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024 (Lentera today/Kompas)



"Kalau ketiadaan sosok ayah, salah satunya berdampak pada karakter anak. Karena yang bisa membangun karakter anak itu ayah. Kalau pada perempuan, banyak yang bilang ayah adalah cinta pertama anak perempuannya. Bayangkan kalau figur itu tidak ada, pasti akan ada sesuatu

Fuji Astutik, M.Psi.



PENDERITA TBC RENTAN GANGGUAN KESEHATAN MENTAL DARI LINGKUNGAN

PENELITI tuberkulosis dan akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ahmad Fuady M.Sc PhD mengatakan penderita tuberkulosis atau TBC rentan mengalami gangguan kesehatan mental karena kerap dikucilkan dari lingkungannya.

Salah satu manfaat vitamin E adalah "Yang kena TBC apalagi yang resistan obat, mereka masih mengalami mental health yang terganggu, gimana kerjanya, gimana kalau ditinggal teman, dikeluarkan dari kerjaan, ditinggal pasangan. Mereka butuh support psikologis," kata Ahmad dalam konferensi pers Hari Tuberkulosis bersama Stop TB Partnership Indonesia (STPI) di Jakarta.

Ahmad mengatakan dalam penelitian yang pernah ia lakukan di tujuh provinsi di Indonesia, sebanyak 61 persen orang mengalami stigmatisasi TBC, dan 31 persen di antara mereka mengalami depresi.

Pengukuran tingkat depresi pasien TBC ada pada bagaimana stigmatisasi masyarakat yang dialamatkan pada pasien, adanya depresi atau kecemasan terhadap pekerjaan dan reaksi keluarga, dan bagaimana

kualitas hidupnya setelah didiagnosa terkena tuberkulosis.

Ia mengatakan perlu adanya intervensi dari berbagai pihak baik pribadi maupun komunitas penyintas TBC agar bisa membangun sebuah sistem dukungan yang bisa menurunkan masalah kecemasan penderita TBC.

"Yang sedang kami lakukan di dua provinsi Depok dan Padang, kami ukur kalau ada pasien datang pertama kali terdiagnosis TBC baik sensitif maupun kebal ditanya ada nggak masalah mentalnya, kalau ada kita skrining dan di arahkan ke pertemuan kelompok," katanya.

Grup konseling dilakukan dengan memberikan ruang pada penderita TBC mengekspresikan keluh kesahnya dan saling membantu satu sama lain karena memiliki kesamaan yang bisa dibagikan.

Konseling juga bisa dilakukan untuk keluarga yang kerap mengucilkan anggota keluarga lainnya yang terkena TBC, agar mereka tetap bisa diterima di lingkungan keluarganya.

Dukungan juga bisa diwujudkan dari lingkungan pekerjaan dengan

memberikan hak-hak bagi penderita TBC jika mereka pergi ke pusat kesehatan.

Ahmad mengatakan perusahaan sebaiknya tidak mengeluarkan karyawannya karena TBC, diberikan keleluasaan untuk berobat, dan tidak dipotong gaji saat izin berobat setidaknya 2 bulan atau 2 minggu sampai pasien merasa lebih baik.

Bagi pekerja yang memiliki risiko terpapar silika di pekerjaannya, perusahaan diharapkan memberikan fasilitas skrining agar TBC bisa dicegah lebih awal.

Terapi pencegahan

Sementara itu, Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Dr dr Erlina Burhan mengatakan penyakit tuberkulosis (TB) dapat diobati dan dicegah melalui Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

"TPT itu adalah pengobatan yang diberikan kepada seseorang yang terinfeksi kuman *Mycobacterium tuberculosis* dan berisiko sakit TB," katanya dalam keterangan tertulis di

Jakarta, Senin.

Erlina yang juga Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Untuk Penanggulangan TB (KOPI TB) itu mengatakan TPT dapat mengurangi risiko TB sebesar 24-86 persen pada seluruh populasi berisiko, termasuk pasien terdiagnosis TB laten.

Selain itu, TPT berperan mengurangi risiko atau kematian akibat TB pada pasien HIV yang rutin mengonsumsi obat antiretroviral (ARV) hingga 60 persen serta mengurangi risiko TB hingga 82 persen pada pasien anak.

Ia menyebut notifikasi kasus TB di Indonesia mengalami peningkatan pada 2022, dengan penemuan TB mencapai 724.000 kasus.

Angka itu meningkat menjadi 821.000 pada 2023, yang merupakan angka tertinggi sejak 1995.

"Meskipun terjadi peningkatan notifikasi kasus, peningkatan akses terhadap TPT masih berlangsung lambat. Pencegahan infeksi TB dan pencegahan perkembangan infeksi menjadi penyakit adalah kunci untuk mengurangi jumlah kasus TB sesuai dengan yang ditargetkan dalam Strategi End TB dari WHO," ujarnya (Antara)



"Yang kena TBC apalagi yang resistan obat, mereka masih mengalami mental health yang terganggu, gimana kerjanya, gimana kalau ditinggal teman, dikeluarkan dari kerjaan, ditinggal pasangan. Mereka butuh support psikologis,

dr. Ahmad Fuady M.Sc PhD

SATELIT MERAH PUTIH 2 OPERASI PENUH SEMESTER II 2024

PT. Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), sebagai penyedia layanan satelit dari PT Telkom, menyebutkan satelit yang baru diluncurkannya pada awal tahun yaitu Satelit Merah Putih 2 dipastikan dapat beroperasi penuh pada semester II 2024.

Presiden Direktur Fujifilm Indonesia Masato Yamamoto m"Kami mulai (beroperasi) bertahap, sekitar kurang lebih 40 persen capacity akan siap di semester I ini atau mulai bulan April. Kemudian, capacity berikutnya akan ready sepenuhnya di semester II," kata Direktur Pengembangan Bisnis (CDO) Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan di Jakarta.

Satelit Merah Putih 2 merupakan satelit telekomunikasi terbaru dari PT Telkomsat yang diperuntukkan untuk memenuhi transaksi Bussiness to Bussiness (B2B) di Indonesia.

Kehadiran satelit ini menysasar pelaku bisnis VSAT (Very Small Aperture Terminal) Operator yang nantinya konektivitas dari satelit tersebut bisa dirasakan oleh pelanggan dari VSAT Operator tersebut.

Satelit berkapasitas 32 Gbps yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite itu memiliki keunggulan daya cakup yang lebih luas dibandingkan dengan satelit-satelit sebelumnya yang dimiliki oleh Telkom.

"Dibandingkan dengan satelit-satelit yang kita miliki sebelumnya, user experience yang dialami akan meningkat 10 kali lipat," ujar Anggoro.

Untuk itu, ia menilai VSAT Operator dapat memanfaatkan konektivitas dari Satelit Merah Putih 2 untuk berbagai sektor bahkan penggunaannya cocok digunakan di laut karena jangkauannya yang andal tersebut.



Penampilan Satelit Merah Putih 2 saat berada di tempat perakitanya yaitu Thales Alenia Space (ANTARA)

Agar dapat memulai operasinya, saat ini Telkomsat sedang menunggu evaluasi In Orbit Test secara keseluruhan dari Satelit Merah Putih 2 yang dilakukan oleh perusahaan satelit tersebut yaitu Thales Alenia Space.

Adapun sebelumnya, satelit itu berhasil diluncurkan ke angkasa menggunakan roket Falcon-9 milik SpaceX pada 20 Februari 2024 di Cape Canaveral, Florida, AS.

Tak butuh waktu yang terlalu lama, satelit itu menempati orbitnya di 113 Bujur Timur (BT) pada 3 Maret 2024.

Pada 21 Maret 2024, In-Orbit Test atau pengetesan satelit setelah berada di orbitnya dilakukan untuk memastikan sistem pengendali dan juga sistem komunikasi dari Satelit Merah Putih 2 bekerja dengan optimal dalam posisinya di angkasa.

"Kami menunggu hasil-hasil review itu di minggu ini. Sekitar

tanggal 27 nanti kami akan tetapkan apakah semuanya sudah oke atau tidak. Tapi so far, masih baik," kata Anggoro.

Kapasitas dan jangkauan

Satelit Merah Putih 2 merupakan satelit ke-11 sekaligus satelit pertama TelkomGroup yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) atau yang juga dikenal dengan broadband satelit.

Satelit ini diluncurkan dengan roket Falcon 9 dan akan menempati slot orbit 113 derajat Bujur Timur (113 BT).

Dengan kapasitas hingga 32 Gbps, Satelit Merah Putih 2 membawa transponder aktif frekuensi C-band dan Ku-band, yang akan menjangkau seluruh area Indonesia.

Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf menyebut

teknologi HTS merupakan teknologi dengan desain cakupan area di bumi yang berukuran kecil namun banyak (multi-spots beam).

Tiga misi

Direktur Wholesale & International Service Telkom Bogi Witjaksono mengatakan setidaknya ada tiga misi yang ingin dibawa Satelit Merah Putih 2.

Pertama, meningkatkan ketahanan infrastruktur digital nasional untuk mendukung pemerataan konektivitas di seluruh Indonesia.

Kedua, mengamankan dan mempertahankan slot orbit Indonesia di 113 BT; Ketiga, memperkuat portofolio bisnis satelit melalui peningkatan kapasitas internal dari 10 Gbps (Satelit Telkom 3S dan Satelit Merah Putih) menjadi 42,4 Gbps.

Sasaran pelanggan

Satelit Merah Putih 2 akan dimanfaatkan untuk membantu pemerataan digital di Indonesia.

Bentuknya lewat penyediaan layanan backhaul berbasis satelit, mengembangkan bisnis maritim di Indonesia, dan mendukung kedaulatan data dengan mengurangi ketergantungan kapasitas satelit asing.

Telkom menyebut sasaran pengguna satelit ini adalah terutama perusahaan.

"Potensi bisnis backhaul yang menjadi sasaran satelit ini terproyeksi sangat positif. Hal ini terlihat dari antusiasme calon pelanggan korporat maupun operator VSAT yang ingin menggunakan layanan satelit tersebut," menurut siaran pers perusahaan (Antara/CNN)



CANCER

GAYA HIDUP BISA TINGKATKAN RISIKO KANKER DI USIA MUDA

KASUS kanker dalam beberapa tahun terakhir terus naik di dunia, khususnya di kalangan dewasa muda dalam kelompok usia 31 hingga 40 tahun.

Alasan peningkatan kejadian ini adalah perubahan pola makan, yang mencakup peningkatan asupan makanan olahan, daging merah, dan makanan berlemak, serta penurunan konsumsi serat dan zat gizi mikro.

Dr. Rajshekhar C Jaka, Konsultan - Bedah Onkologi dan Bedah Robotik, Rumah Sakit Manipal Whitefield, Jayanagar dan Malleshwaram menyatakan gaya hidup yang tidak banyak bergerak dan peningkatan penggunaan tembakau dan alkohol merupakan faktor tambahan yang

berkontribusi terhadap peningkatan kasus ini.

Hal ini menyiratkan adanya kebutuhan mendesak untuk fokus pada deteksi kanker, karena jika terdeteksi dini, pada stadium 1 dan 2, kanker tersebut seringkali dapat disembuhkan, termasuk juga kanker kolokteral.

Bahkan pada stadium 3, pengobatan massa kanker secara memadai dapat menyembuhkan. Kemajuan dalam pengobatan, termasuk medis, tertarget, dan imunoterapi, telah meningkatkan hasil secara signifikan.

Teknik bedah, khususnya bedah robotik, telah mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga memungkinkan pengangkatan tumor secara tepat dengan komplikasi yang lebih sedikit.

Bedah robotik telah memberikan banyak perbedaan pada banyak pasien dalam hal pelestarian organ seperti sfingter, sehingga menjaga kontinensia dan menghindari kebutuhan akan stoma permanen, yang sangat berdampak pada kehidupan sosial pasien.

Tindakan pencegahan dan perubahan gaya hidup tertentu dapat membantu menurunkan risiko kanker kolorektal.

Peningkatan aktivitas fisik, perubahan pola makan termasuk peningkatan asupan buah dan sayur, serta berhenti merokok merupakan faktor penting.

Bukti menunjukkan bahwa aspirin

yang diminum dalam dosis rendah selama 5 sampai 10 tahun dapat menurunkan risiko kambuhnya kanker kolorektal.

Faktor terpenting yang meningkatkan risiko adalah merokok, konsumsi daging merah atau olahan, konsumsi alkohol dalam jumlah banyak, obesitas, dan kadar vitamin D yang rendah.

Risiko kanker kolokteral

Orang yang memiliki polip di usus besar, penyakit radang usus, fibrosis kistik, atau riwayat keluarga dengan kanker kolorektal juga lebih mungkin terkena penyakit ini dibandingkan orang lain.

Gejala seperti perubahan kebiasaan buang air besar, peningkatan frekuensi buang air besar (4 hingga lima kali sehari), rasa tidak tuntas buang air besar setelah buang air besar, dan anemia (hemoglobin rendah) tidak boleh diabaikan.

Wasir (wasir) atau Anemia pada individu berusia di atas 40 tahun mungkin mengindikasikan kanker kolorektal dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui kolonoskopi.

Skrining direkomendasikan untuk individu berusia di atas 50 tahun, dengan setidaknya satu kolonoskopi dapat mendiagnosis kanker stadium awal. Mereka yang memiliki riwayat keluarga menderita kanker harus menjalani kolonoskopi 10 tahun sebelum usia anggota keluarga tersebut didiagnosis. (Bisnis/halodoc)

GEJALA UMUM YANG DIALAMI OLEH PENGIDAP KANKER

- Ada perubahan pada bentuk bagian tubuh tertentu.
- Mengalami kelelahan terus-menerus.
- Penurunan berat badan secara tiba-tiba.
- Terdapat benjolan atau pembengkakan pada salah satu bagian tubuh dalam durasi yang lama.
- Perubahan kulit yang lebih rentan iritasi, muncul lesi, tahi lalat, atau kemerahan.
- Demam.
- Mengalami konstipasi atau sembelit yang semakin memburuk.
- Terdapat darah pada urine maupun feses.
- Sakit kepala.
- Gangguan penglihatan dan pendengaran.
- Gangguan kesehatan pada mulut, seperti sariawan atau lesi di sekitar mulut



Lagi-lagi Putusan ... (dari Hal 1)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah dalam kasus dugaan pengelembungan suara Golkar di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI.

KPU terbukti membiarkan adanya selisih perolehan suara Golkar di dapil Jatim VI. Padahal, saksi Partai Demokrat bernama Saman sudah menyampaikan temuan selisih tersebut saat rekapitulasi suara.

"Menyatakan terlapor [KPU] terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam sidang putusan di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Perkara itu tercatat dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Gugatan dilayangkan oleh Saman selaku saksi dari Partai Demokrat.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, anggota majelis Puadi menyatakan tindakan KPU yang membiarkan keberatan Saman merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur Pasal 91 Ayat (3) PKPU Nomor 5/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

"Tindakan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan melakukan pembedaan seketika atas selisih perolehan suara pada pemilu calon anggota DPR Partai Golkar dapil Jawa Timur VI merupakan pelanggaran administrasi pemilu," ujar Puadi.

Pada hal, kata Puadi, KPU seharusnya menerima keberatan saksi dari Partai Demokrat dan segera melakukan perbaikan.

Dia juga menyebut KPU sebagai terlapor dalam sidang tidak membantah atau membuktikan sebaliknya selisih perolehan suara tersebut.

Anggota majelis lainnya, Herwyn JH Malonda menyebut dari bukti-bukti yang dibawa Saman, ada beberapa yang terbukti ditemukannya selisih hasil.

Dia mengatakan ada enam TPS yang terbukti ada selisih perolehan suara antara formulir C.Hasil yang diunggah petugas KPPS di TPS dan D.Hasil hasil rekapitulasi tingkat kecamatan.

Meski demikian, majelis tidak memberikan sanksi berupa perbaikan administrasi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara.

Bawaslu hanya memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti Pemilu Penuh Malpraktik

Perhimpunan Jaga Pemilu menyoroti berbagai dugaan kecurangan

dan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Meski enggan mengatakan Pemilu 2024 brutal, Sekretaris Jaga Pemilu, Luky Djani, menyebut Pemilu tahun ini nirintegritas dan penuh malpraktik.

"Kalau ditanya kebrutalan itu susah, kata itu sulit diterapkan untuk konteks kepemiluan," ujar Luky saat konpers Jaga Pemilu di Permata Building, Kuningan, Selasa (26/3/2024).

"Kami menggunakan istilah terjadinya Pemilu yang malpraktik dan nirintegritas. Itu dua kata yang kami gunakan dan kami anggap sudah ada framework-nya secara internasional," tambahnya.

Nirintegritas mengacu pada banyaknya lembaga pemerintah, termasuk penyelenggara Pemilu, yang dianggap tidak netral. Ini dapat terlihat dari banyaknya keluhan soal netralitas yang ditemukan Jaga Pemilu pada masa kampanye.

Jaga Pemilu menemukan 914 kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024 berdasarkan laporan yang dihimpun mulai 29 Agustus 2023 hingga 19 Maret 2024.

"Dari 914 kasus, yang kami verifikasi, filter, saring itu ada 658 kasus," kata Sekretaris Perhimpunan Jaga Pemilu Luky Djani di kawasan Setiabudi, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Luky lantas menjelaskan dari 658 temuan yang sudah diverifikasi terdapat 210 kasus yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Sementara itu, ia menjelaskan dari ratusan temuan tersebut terinci sembilan jenis pelanggaran pemilu, yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, netralitas aparatur penyelenggara negara, pelanggaran kampanye seperti melibatkan anak-anak, politik uang, maupun adanya intimidasi.

Selanjutnya, kata dia, kampanye di masa tenang, sistem informasi rekapitulasi (Sirekap), rekapitulasi yang menyimpang, serta pelanggaran kode etik.

"Dari sembilan jenis pelanggaran yang kami klasifikasi ini, kalau ditanya apa yang paling besar? 24 persen terkait dengan laporan Sirekap," ujarnya.

Adapun untuk pelaku pelanggaran Pemilu, ia menyebut sebanyak 55 persen dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Ia menjelaskan terdapat dua kategori pelanggaran pemilu yang dilakukan penyelenggara, yaitu inkompetensi dalam menjalankan proses pemilu, dan kesengajaan atau manipulasi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU

Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Sengketa Terbanyak: Papua Tengah

Belum genap dua tahun dibentuk, Provinsi Papua Tengah sudah menjadi provinsi yang hasil penghitungan suaranya paling banyak menimbulkan sengketa dan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terungkap berdasarkan hasil penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Ini sesuatu hal yang menarik, ya. Jadi, Papua Tengah yang merupakan daerah otonomi baru dan baru ikut pemilu di 2024, ternyata merupakan peringkat pertama daerah dengan jumlah perkara yang masuk di MK, yaitu dengan 21 perkara," ujar peneliti Perludem, Ihsan Maulana, dalam rilis hasil penelitian mereka melalui siaran YouTube, Selasa (26/3/2024).

Penelitian ini dilakukan hingga Senin (25/3/2024) atas permohonan sengketa pileg tingkat DPR RI maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang telah didaftarkan pada 21-23 Maret 2024, dan dipublikasikan secara resmi oleh MK lewat situs resminya.

Hasilnya, dari 38 provinsi di Indonesia, sengketa pemilihan legislatif (pileg) di wilayah hasil pemekaran Provinsi Papua itu mendominasi. Pada Pemilu 2024, sedikitnya tiga perempat dari delapan kabupaten yang ada di Papua Tengah, seluruh tempat pemungutan suara (TPS)-nya masih menggunakan sistem noken.

Kabupaten-kabupaten yang tercatat TPS-nya menerapkan sistem noken tanpa pengecualian adalah Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Di bawah Papua Tengah, ada Aceh (17 perkara), Sumatera Selatan (16 perkara), Papua (15 perkara), Jawa Barat (14 perkara), Jawa Timur (12 perkara), Papua Pegunungan (11 perkara), Maluku Utara (10 perkara), dan Maluku (10 perkara) sebagai provinsi dengan jumlah sengketa terbanyak di MK.

Hingga 26 Maret 2024, MK telah mengumumkan ada 263 sengketa Pileg DPR RI dan DPRD, 12 sengketa pileg DPD RI, dan dua sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. (wid,rls,ist,ant,kum/dya)

BEBERAPA GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) MASUK MK

GUGATAN CAPRES-CAWAPRES.

- Timnas capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan pada Kamis (21/3/2024) pukul 00.58 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonannya, pasangan AMIN ingin pengulangan suara ulang (PSU) tanpa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka.
- TPN capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan permohonan pada Sabtu (23/3/2024) pukul 16.53 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Ganjar-Mahfud meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

GUGATAN PARTAI POLITIK.

- PPP mengajukan PHPU dengan menggugat hasil Pemilu 2024 di 18 provinsi se-Indonesia. PPP mengklaim seharusnya meraup sebanyak 6 juta lebih suara dan melewati ambang batas parlemen empat persen.
- Partai Demokrat mengajukan permohonan PHPU 2024 terkait pelanggaran pada 11 provinsi, di antaranya Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, dan lainnya. dugaan pengelembungan suara bagi partai lain serta tidak diadakannya rapat pleno KPU.
- PSI yang hanya mengajukan permohonan PHPU 2024 untuk dua provinsi, yakni Sumatera Utara dan Jawa Timur. Alasannya, terdapat perbedaan antara penghitungan versi KPU dengan penghitungan versi PSI dari C1.
- Koordinator Kuasa Hukum PKS Ahmar Ihsan Rangkti menyatakan, pihaknya mengajukan permohonan untuk tiga provinsi sekaligus yakni Papua, Gorontalo, dan Jawa Timur.

GUGATAN CALEG

- Calon legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar) Ham Kora mengajukan permohonan PHPU anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 5. Ada dugaan kecurangan dari perolehan suara yang didapatkannya pada beberapa dapil.





DK PBB SETUJUI RESOLUSI GENCATAN SENJATA GAZA, ISRAEL BERGEMING

Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara untuk mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza selama bulan suci Ramadan. (Dok)

JAKARTA - Israel bergeming meski Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) telah meloloskan resolusi soal gencatan senjata. Serangan brutal di Jalur Gaza masih terus terjadi.

Dilansir AFP, pasukan Israel disebut masih menggempur Jalur Gaza pada Selasa (26/3/2024), terutama di dan sekitar tiga rumah sakit besar Gaza.

Militer Israel bahkan mengerahkan jet tempur dan menyerang lebih dari 60 sasaran di Gaza dalam 24 jam, termasuk terowongan dan infrastruktur yang dicurigai jadi persembunyian Hamas.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan 70 orang tewas pada Selasa pagi, 13 di antaranya akibat serangan udara Israel di sekitar kota Rafah di selatan.

DK PBB meloloskan resolusi gencatan senjata Gaza, setelah disetujui oleh 14 anggota DK PBB. Namun Amerika Serikat memilih abstain.

AS memilih abstain alih-alih menyetujui resolusi, karena menganggap DK PBB mengabaikan perubahan penting yang diusulkan Washington, termasuk permintaan menambah kecaman terhadap Hamas.

"Kami menghargai kesediaan anggota Dewan untuk melakukan beberapa perubahan dan menyempurnakan resolusi ini. Namun perubahan penting tertentu diabaikan, termasuk permintaan kami

untuk menambah kecaman terhadap Hamas," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

"Kami tidak setuju dengan semua yang ada dalam resolusi ini. Oleh karena itu sayangnya kami tidak dapat memilih ya [setuju dengan resolusi]," ujarnya, dikutip AFP.

Netanyahu Marah ke AS

Menanggapi sikap abstain AS, Israel marah dan membatalkan pengiriman delegasi ke Washington.

"Hal ini kemunduran yang jelas dari posisi konsisten AS," demikian pernyataan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan tidak akan mengakhiri perang melawan Hamas, sampai kelompok itu membebaskan sandera di Gaza.

"Kami tidak punya hak moral untuk menghentikan perang, sementara masih ada sandera yang ditahan di Gaza. Kurangnya kemenangan yang menentukan di Gaza mungkin membawa kita lebih dari dekat ke perang di utara," kata Gallant.

Meski menyambut gencatan senjata ini, Hamas menyatakan akan tetap berpegang pada proposal awal mereka, yakni gencatan senjata secara total di Gaza.

Hamas juga menuntut penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pemulangan warga Palestina yang

masih ada di tempat pengungsian.

Resolusi terbaru DK PBB yang disahkan pada Senin (25/3/2024) malam, mencakup desakan gencatan senjata segera selama bulan Ramadhan di Gaza. Resolusi ini juga menyerukan agar lebih banyak bantuan masuk Gaza, hingga pembebasan sandera Hamas tanpa syarat.

Dari Indonesia, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud menyatakan bahwa PBB sudah seharusnya menghentikan perang di Gaza, Palestina, tak hanya melakukan resolusi gencatan senjata.

"Gencatan senjata itu seharusnya, sudah seharusnya demikian, bahkan stop war (hentikan perang), tidak sekadar gencatan senjata," kata Marsudi saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/3/2024)

Ia mengemukakan gencatan senjata yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB baru atas desakan dari berbagai negara, utamanya di Bulan Ramadhan 1455 H ini, tetapi lebih dari itu, seharusnya PBB lebih bertindak tegas sesuai dengan hukum.

"Gencatan senjata ini kan karena diminta berbagai negara, khususnya di Bulan Ramadhan ini, tetapi semestinya PBB itu harus bisa memberhentikan perang, kembali kepada hukum," ucapnya.

Menurutnya, dialog dan musyawarah bisa lebih diutamakan untuk menunjukkan karakter manusia yang lebih beradab.

"Jadi, dialog, diskusi, dan musyawarah jauh lebih baik, penyelesaian tanpa perang itu akan lebih beradab daripada dengan perang," tuturnya. (wid,rls,ist/dya)

FAKTA RESOLUSI GENCATAN SENJATA DI GAZA

- Resolusi tersebut disahkan untuk pertama kali sejak perang Hamas-Israel berkobar mulai 7 Oktober 2023.
- Diajukan sepuluh negara anggota tidak tetap PBB yakni Aljazair, Guyana, Ekuador, Jepang, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia, Korea Selatan, dan Swiss.
- AS memilih abstain. Tidak melakukan veto seperti tiga resolusi gencatan senjata yang diajukan sebelumnya.
- Isi Resolusi :
 - Gencatan senjata selama bulan Ramadhan yang dimulai pada 11 Maret.
 - Kedua pihak Israel dan Hamas harus mengembalikan sandera tanpa syarat sesuai hukum internasional.
 - Menekankan kebutuhan mendesak pemberian bantuan
- Negara mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza selama bulan Ramadan:

- China	- Jepang
- Prancis	- Malta
- Rusia	- Mozambik
- Inggris	- Korea Selatan
- Aljazair	- Sierra Leone
- Ekuador	- Slovenia
- Guyana	- Swiss